

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN *RISK
MANAGEMENT COMMITTEE***

Studi Empiris Perusahaan Non Finansial yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2008-2011



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**ANA KHUSNUN SAFITRI
NIM. 12030111150017**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Ana Khusnun Safitri

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111150017

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis /Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN *RISK
MANAGEMENT COMMITTEE***
(Studi Empiris pada Perusahaan Non Finansial
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun
2008-2011)

Dosen Pembimbing : Wahyu Meiranto S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 2 September 2013

Dosen Pembimbing,

(Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt.)

NIP. 19760522 200312 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Ana Khusnun Safitri

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111150017

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis /Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN *RISK
MANAGEMENT COMMITTEE***
(Studi Empiris pada Perusahaan Non Finansial
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 16 September 2013

Tim Penguji

1. Wahyu Meiranto, S.E., M.Si, Akt. (.....)
2. Dr. H. Raharja, M.Si., Akt. (.....)
3. Herry Laksito, S.E., M.Adv.,Acc., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya Ana Khusnun Safitri, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Risk Management Committee (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Finansial yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2011)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah – olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah – olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 28 Agustus 2013

Yang membuat pernyataan,

(Ana Khusnun Safitri)

NIM : 12030111150017

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the factors which influential the establishment of Risk Management Committee (RMC). There are two types of RMC, the one that combined with the audit committee and seperated from the audit committee. The factors that used in this research are board of director characteristic and firm characteristic that consist of proportion of independent commissioner, board size, board meeting, commissioner with accounting/finance expertise, and leverage, also firm size as control variabel.

Sample of this research were 204 samples from non financial companies listed in Indonesia Stock Exchange for the observation period of 2008 until 2011. Collecting data in this research used a purposive sampling method. This research used logistic regression to analyze data.

The results of this research indicated that firm size affected positively and significant with the establishment of RMC that combined with audit committee and separated RMC. The other variables (proportion independent commisioner, board size, board meeting, commisioner with accounting/financial expertise, leverage) have no significant association with the establishment of RMC that combined with audit committee and separated RMC.

Keywords : Corporate Governance, Risk Management Committee, Board of Commissioner Characteristics, and Firm Characteristics.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan *Risk Management Committee* (RMC). Terdapat dua tipe RMC yaitu tergabung dengan komite audit dan terpisah dari komite audit. Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah karakteristik dewan komisaris dan karakteristik perusahaan yang terdiri dari proporsi komisaris independen, ukuran dewan, frekuensi rapat dewan, komisaris dengan keahlian akuntansi/keuangan, dan *leverage*, juga ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 204 sampel dari perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode penelitian tahun 2008 sampai 2011. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan regresi logistik untuk menganalisis data.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC yang tergabung dengan komite audit dan RMC yang terpisah dengan komite audit. Sedangkan variabel lain (proporsi komisaris independen, ukuran dewan, rapat dewan, komisaris dengan keahlian akuntansi/keuangan, leverage) tidak berpengaruh yang signifikan dengan pembentukan RMC yang tergabung dengan komite audit dan RMC yang terpisah dengan komite audit.

Kata Kunci : *Corporate Governance*, *Risk Management Committee*, Karakteristik Dewan Komisaris, dan Karakteristik Perusahaan.

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai mengerjakan suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh – sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Q.S Al Insyirah :5-8)

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku),maka pasti azab-Ku sangat berat."(QS.Ibrahim :14)

"Success is an achievement. While, struggling is a must." (Anonim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk

Orangtuaku dan seluruh keluargaku

Kekasih tersayang

Teman-teman Ekstensi Akuntansi 2011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pembentukan *Risk Management Committee* (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Finansial yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2011)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Much. Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Wahyu Meiranto, S.E., M.Si, Akt., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan nasihat, bimbingan, dukungan, serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Drs. Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D., selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam bidang akademis.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, khususnya Dosen Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan yang berharga bagi penulis.
6. Bapak Jubaidi dan Ibu Rantiyem selaku orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan yang tak pernah putus kepada penulis, dan juga kakakku Zuli Rochmawati dan iparku. Semoga penulis dapat menjadi seperti yang kalian harapkan dan banggakan.
7. Erlangga Burinda Putra atas doa, dukungan, motivasi, serta kasih sayang kepada penulis.
8. Teman-teman Ekstensi Akuntansi 2011. Terimakasih atas persahabatan, kekompakan, dan kesolidaritan kita selama masa kuliah di Undip. Kalian istimewa.
9. Teman-teman terdekatku Dian, Destia, Anti, dan Ratu. Terimakasih atas persahabatan, warna-warni kehidupan yang telah kita lalui bersama, dan pelajaran hidup yang berharga. Terimakasih.
10. Teman satu bimbingan Anin dan Anti. Terimakasih telah menemani, berbagi cerita dan dukungan dengan penulis selama bimbingan.
11. Teman-teman KKN Desa Gondang Kecamatan Limbangan, Sholeh, Shara, Ruri, Bibit, Arief, Hendi, Ebam, Abhe, dan Mita. Terimakasih telah menjadi teman baik selama 35 hari sampai sekarang.
12. Teman-teman kos Griya Padmasari, Hera, Ratu, Ratih, dll. Terimakasih atas persahabatan selama penulis studi di Undip.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini sampai selesai.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis meminta saran dan kritik yang dapat digunakan untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membacanya.

Semarang, 28 Agustus 2013

Penulis,

(Ana Khusnun Safitri)

NIM : 12030111150017

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	12
II. TELAAH PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Keagenan	14
2.1.2 Corporate Governance di Indonesia	15
2.1.3 Risiko dan Manajemen Risiko	18

2.1.4	Risk Management Committee.....	21
2.1.5	Risk Management Committee pada Sektor Perbankan.....	23
2.1.6	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Risk Management Committee	23
2.1.6.1	Proporsi Komisaris Independen	23
2.1.6.2	Ukuran Dewan Komisaris	24
2.1.6.3	Frekuensi Rapat Dewan	25
2.1.6.4	Komisaris dengan Keahlian Akuntansi/Keuangan.....	26
2.1.6.5	Leverage.....	26
2.1.6.6	Ukuran Perusahaan.....	27
2.2	Penelitian Terdahulu	28
2.3	Kerangka Pemikiran.....	32
2.4	Pengembangan Hipotesis	34
2.4.1.	Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Pembentukan RMC	34
2.4.2.	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pembentukan RMC	36
2.4.3.	Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan terhadap Pembentukan RMC	38
2.4.4.	Pengaruh Komisaris dengan Keahlian Akuntansi/Keuangan terhadap Pembentukan RMC.....	39
2.4.5.	Pengaruh Leverage terhadap Pembentukan RMC.....	40
III.	METODE PENELITIAN.....	41
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	41
3.1.1	Variabel Penelitian	41
3.1.2	Definisi Operasional.....	42
3.2	Populasi dan Sampel	46
3.3	Jenis dan Sumber Data	47
3.4	Metode Pengumpulan Data	47
3.5	Metode Analisis	47
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1.	Deskripsi Objek Penelitian.....	53
4.2.	Statistik Deskriptif	54

4.2.1.	Statistik Deskriptif Proporsi Komisaris Independen.....	55
4.2.2.	Statistik Deskriptif Ukuran Dewan Komisaris.....	56
4.2.3.	Statistik Deskriptif Frekuensi Rapat Dewan	56
4.2.4.	Statistik Deskriptif Keahlian Akuntansi/Keuangan Dewan Komisaris	57
4.2.5.	Statistik Deskriptif <i>Leverage</i>	57
4.2.6.	Statistic Deskriptif Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan	58
4.3.	Pengujian Multikolinearitas	58
4.4.	Pengujian Kelayakan Model Regresi dan Keseluruhan Model.....	60
4.5.	Koefisien Determinasi.....	63
4.6.	Matrik Klasifikasi.....	65
4.7.	Pengujian Koefisien Regresi dan Hipotesis	66
4.7.1	Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap RMC dan SRMC.....	68
4.7.2	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap RMC dan SRMC ...	69
4.7.3	Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan terhadap RMC dan SRMC.....	69
4.7.4	Pengaruh Keahlian Akuntansi/Keuangan Dewan Komisaris terhadap RMC dan SRMC	70
4.7.5	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap RMC dan SRMC	71
4.7.6	Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap RMC dan SRMC (Variabel Kontrol).....	71
4.8.	Pembahasan.....	72
4.8.1	Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Pembentukan RMC.....	72
4.8.2	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pembentukan RMC.....	73
4.8.3	Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan terhadap Pembentukan RMC...	74
4.8.4	Pengaruh Keahlian Akuntansi/Keuangan Dewan Komisaris terhadap Pembentukan RMC	75
4.8.5	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Pembentukan RMC	76

V. PENUTUP.....	78
5.1. Kesimpulan	78
5.2. Keterbatasan dan Saran	80
5.2.1. Keterbatasan.....	80
5.2.2. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	30
Tabel 4.1 Proses Seleksi Sampel dengan Kriteria.....	54
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	55
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas Model Regresi I.....	59
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas Model Regresi II.....	59
Tabel 4.5 Uji Kelayakan Model.....	61
Tabel 4.6 Uji Keseluruhan Model.....	62
Tabel 4.7 Omnibus Test	62
Tabel 4.8 Koefisien Determinasi Model I.....	64
Tabel 4.9 Koefisien Determinasi Model II	64
Tabel 4.10 Matrik Klasifikasi Model Regresi I	65
Tabel 4.11 Matrik Klasifikasi Model Regresi II	66
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik Model I.....	67
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik Model II.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	33
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Daftar Perusahaan Sampel.....	87
Lampiran B Hasil Ouput SPSS	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, lembaga keuangan runtuh dan diselamatkan oleh pemerintah selama krisis keuangan global 2007-2008. Kegagalan lembaga-lembaga mengakibatkan pembekuan kredit pasar global dan intervensi pemerintah diperlukan di seluruh dunia. Sedangkan faktor-faktor ekonomi makro (misalnya, kebijakan moneter yang longgar) yang berada di akar krisis keuangan mempengaruhi semua perusahaan (Taylor, 2009), beberapa perusahaan terkena dampak lain lebih besar. Kejadian tersebut telah menarik perhatian investor dan regulator, tanpa memperhatikan penyebab kejadian tersebut karena pengambilan risiko yang berlebihan (*excessive risk taking*) dalam jangka pendek (Kashyap *et al*, 2008) atau peningkatan level risiko pada perusahaan (Raber, 2003), sebagai penyebab timbulnya krisis (Tao dan Hutchinson, 2011).

Perkembangan situasi ekonomi dan bisnis yang makin pesat akan diikuti dengan kompleksitas risiko yang dihadapi. Risiko merupakan suatu kondisi yang muncul akibat ketidakpastian (Hanafi, 2009). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142 /PMK.010/2009 menjelaskan bahwa risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan kerugian bahkan perusahaan dapat mengalami kebangkrutan. Penelitian terbaru menyatakan bahwa manajemen risiko perusahaan dan kebijakan pendanaan berdampak signifikan pada sejauh mana

perusahaan-perusahaan terkena dampak krisis keuangan (Brunnermeier, 2009 dalam Erkenz, *et al.*, 2012). Karena manajemen risiko perusahaan dan kebijakan pendanaan pada akhirnya merupakan hasil dari biaya dan manfaat yang dibuat oleh dewan komisaris perusahaan dan pemegang saham (Kashyap, *et al.*, 2008), sehingga manajemen risiko merupakan cara yang dibutuhkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang mempengaruhi nilai perusahaan dan menerapkan suatu strategi yang luas untuk mengelola risiko tersebut dalam rangka membangun manajemen risiko yang efektif (Meulbroek, 2002), sebagai bagian terpenting untuk mewujudkan *good corporate governance*.

Penerapan *corporate governance* dalam perusahaan, aspek pengawasan dalam pelaksanaan manajemen risiko menjadi faktor penting demi menciptakan sistem manajemen risiko perusahaan yang efektif, sehingga diperlukan peran Dewan Komisaris (Krus dan Orowitz, 2009). Fama dan Jensen (1983) mengemukakan bahwa dewan komisaris adalah pembuat keputusan utama dalam organisasi dan memiliki kekuatan untuk mengimbangi seluruh keputusan yang dibuat oleh manajemen puncak. Selain itu, dewan komisaris dalam proses pengambilan keputusan harus memastikan fungsi *monitoring* telah berjalan efisien. Dewan komisaris dalam tugasnya tanggung jawab dapat mendelegasikan tugas pengawasan risiko kepada komite pengawas manajemen yang sebagian besar diamanatkan pada Komite Audit (Krus dan Orowitz, 2009). Hal ini sesuai dengan lampiran keputusan Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tentang pedoman pelaksanaan kerja komite audit bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab

komite audit adalah melaporkan kepada dewan komisaris mengenai berbagai risiko dan pelaksanaan manajemen risiko serta pengendalian perusahaan. Dalam Pedoman Pembentukan Komite Audit yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Corporate Governance (KNKG) tahun 2002, menyatakan bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab komite audit adalah mengenai manajemen risiko dan kontrol perusahaan yang didalamnya juga mencakup identifikasi risiko dan evaluasi risiko untuk meminimalkan risiko.

Manajemen risiko mendapat perhatian lebih pada komite yang dibentuk dewan komisaris. Komite Audit, Komite Keuangan, dan Komite Manajemen Risiko umumnya menangani manajemen risiko (Yatim, 2009). Literatur tertentu menunjukkan bahwa komite audit mendapat tugas menangani manajemen risiko tetapi ada keraguan tentang keefektifan bahwa komite audit dapat menangani masalah risiko manajemen. Zaman (2001) menunjukkan bahwa tidak masuk akal untuk mengharapkan komite audit untuk bekerja pada tingkat yang lebih tinggi karena kurangnya keahlian dan waktu, terutama setelah tanggung jawab tambahan yang dikenakan pada mereka sesuai dengan prinsip *good corporate governance* yang menekankan pemisahan audit internal dari proses manajemen risiko. Pengawasan manajemen risiko membutuhkan pemahaman yang memadai mengenai struktur dan operasi perusahaan beserta risiko-risiko yang melekat (Bates dan Leclerc, 2009). Menurut Krus dan Orowitz (2009), perusahaan memerlukan sebuah komite yang dapat memberikan waktu penuh untuk pengawasan manajemen risiko. Karena alasan ini beberapa perusahaan membentuk fungsi pengawasan yang terpisah dari audit dan secara khusus

menangani pengawasan terhadap risiko perusahaan, yang disebut *Risk Management Committee*.

Risk Management Committee (RMC) merupakan merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris bersama dengan Komite Audit, Komite Remunerasi, dan Komite Nominasi. RMC dalam perusahaan bertanggung jawab menentukan strategi manajemen risiko, mengevaluasi operasi manajemen risiko, menilai pelaporan keuangan dan memastikan organisasi berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan (COSO, 2004; Sallivan, 2001; Soltani, 2005 dalam Desender, 2007). Dalam penerapannya, RMC dibagi menjadi dua jenis yaitu RMC yang berdiri sendiri (terpisah dari komite audit) dan RMC gabungan (tergabung dengan komite audit).

Risk Management Committee (RMC) yang berdiri sendiri memiliki pengendalian internal yang lebih tinggi terhadap manajemen risiko dibandingkan ketika digabungkan dengan komite audit. Sedangkan RMC gabungan berfokus tidak hanya mengawasi risiko pada manajemen tetapi secara aktif terlibat dalam pelaporan keuangan dan pengawasan fungsi audit (Alles, *et al.*, 2005 dalam Tazilah dan Rashidah, 2010).

Menurut KPMG (2005) ditemukan bahwa komite manajemen risiko masih ada yang diintegrasikan dengan komite audit. RMC dalam beberapa literatur (Liew, *et al.*, 2012; Yatim, 2009) merupakan komite yang dibentuk Dewan Komisaris yang khusus mengawasi pelaksanaan manajemen risiko, yang anggotanya terdiri dari Dewan Komisaris, namun dapat juga menunjuk pelaku independen yang bukan bagian dari perusahaan (KNKG, 2006).

Dalam dunia perbankan di Indonesia, *Risk Management Committee* dikenal dengan nama Komite Manajemen Risiko. Komite Manajemen Risiko (KMR) ini telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/PBI/2003. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa KMR merupakan komite yang berada dibawah Direktur, karena KMR bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus. KMR dalam perbankan berbeda dengan KMR sektor non finansial, yang dalam sektor non finansial disebut Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko terdiri dari Komisaris Independen dan pihak – pihak independen, hal ini telah dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006.

Pelaksanaan manajemen risiko perusahaan tergantung pada peran Dewan Komisaris. Dewan Komisaris yang bertanggung jawab sebagai penjamin pelaksana strategi perusahaan dan pengawasan manajemen dalam mengelola perusahaan. Efektivitas peran Dewan Komisaris dapat diukur melalui karakteristik yang dimiliki antara lain independensi Dewan Komisaris, ukuran dewan, frekuensi rapat dewan dan Komisaris dengan keahlian Akuntansi/keuangan. Independensi Dewan Komisaris berhubungan dengan seberapa besar keterlibatan dewan komisaris dengan aktivitas perusahaan. Ukuran dewan berhubungan dengan jumlah anggota dewan komisaris. Frekuensi rapat dewan berhubungan dengan jumlah rapat yang diadakan dewan komisaris. Sedangkan, Komisaris dengan keahlian Akuntansi/keuangan berhubungan dengan pengetahuan akuntansi dan keuangan dewan komisaris. Faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan manajemen risiko adalah *leverage* perusahaan. *Leverage* perusahaan berhubungan dengan proporsi utang jangka panjang perusahaan terhadap tingkat risiko

keuangan yang dimiliki. Kegiatan manajemen risiko perusahaan juga erat dipantau oleh Komite Audit (Yatim, 2009), namun perlu juga dibentuk *Risk Management Committee* yang berdiri sendiri (Krus dan Orowitz, 2009). Tanggung jawab Komite Audit pada pengelolaan risiko sangat penting dalam pemenuhan tugas Komite Audit (Yatim, 2009). Berdasarkan karakteristik Dewan Komisaris yang baik diharapkan akan memiliki hubungan positif yang signifikan dengan pembentukan RMC.

Penelitian mengenai Komite Audit telah banyak dilakukan di seluruh dunia. Namun, penelitian yang menjelaskan faktor – faktor yang mempengaruhi pembentukan RMC masih belum banyak dilakukan. Hal ini dikarenakan RMC merupakan isu yang masih baru dan pembentukan RMC di perusahaan non finansial di Indonesia masih bersifat sukarela, sehingga bukti empiris tentang formasi dan struktur dari RMC masih terbatas. Berbeda dengan perusahaan yang bergerak di sektor perbankan dimana pembentukan RMC sudah diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Penelitian terdahulu yang meneliti pembentukan RMC pada sektor non finansial, antara lain Liew, *et al.* (2012), Wahyuni (2012), Yatim (2009), Yatim (2010), dan Andarini dan Januarti (2010).

Hasil yang diperoleh dari penelitian mengenai mekanisme *good corporate governance* yang mempengaruhi pembentukan atau keberadaan *Risk Management Committee* sangat beragam. Liew, *et al.* (2012) dan Yatim (2010) melakukan penelitian tentang pembentukan *Risk Management Committee* (RMC) yang sukarela dengan karakteristik Dewan Komisaris sebagai variabel independennya. Penelitian tersebut disimpulkan bahwa ukuran Dewan Komisaris mempunyai

hubungan positif dengan pembentukan RMC yang sukarela. Andarini dan Januarti (2010) melakukan penelitian yang serupa dengan Liew, *et al.* (2012), namun menemukan hasil yang berbeda. Penelitian tersebut menemukan bahwa ukuran dewan tidak berpengaruh terhadap pembentukan RMC.

Namun dalam penelitian Liew, *et al.* (2012) tersebut, proporsi Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan pembentukan RMC, sedangkan dalam penelitian Subramaniam, *et al.* (2009) CEO independen berpengaruh positif dengan keberadaan RMC. Hasil penelitian Liew, *et al.* (2012) mengenai proporsi Komisaris Independen merupakan hasil yang tak terduga pada *corporate governance* karena pada umumnya memberikan hasil yang konsisten pada Komisaris Independen. Carson (2002) juga menemukan tidak adanya hubungan antara kehadiran Komisaris Independen dan keberadaan Komite Audit, Komite Nominasi, dan Komite Remunerasi. Penelitian Yatim (2009) juga menjelaskan pembentukan RMC yang dikaitkan dengan karakteristik Komite Audit. Dalam penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa karakteristik Komite Audit mempunyai hubungan yang positif terhadap pembentukan RMC pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia. Pada penelitian-penelitian sebelumnya memasukkan variabel *Big Four Auditor* karena dipandang dapat mendorong kualitas pengendalian internal yang lebih tinggi, sementara auditor non *Big Four* tidak digunakan dalam penelitiannya karena dianggap tidak memiliki kompetensi yang sama dengan auditor *Big Four*, padahal auditor non *Big Four* juga memiliki kompetensi yang unggul.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, serta peran

Komite Audit terhadap pembentukan *Risk Management Committee*, penulis bermaksud melakukan penelitian untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan *Risk Management Committee* dengan karakteristik Dewan Komisaris dan karakteristik perusahaan dalam penerapan mekanisme *corporate governance* yang dapat mempengaruhi pembentukan *Risk Management Committee*.

Penelitian ini mengadaptasi pada penelitian Liew, *et al.* (2012). Penelitian Liew, *et al.* (2012) menganalisis pada pembentukan RMC secara sukarela yang dipengaruhi oleh karakteristik Dewan Komisaris pada perusahaan yang terdaftar di *Main Market* Malaysia tahun 2009. Sampel yang digunakan adalah 797 perusahaan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ukuran dewan dan *independent director outside directorships* memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap pembentukan RMC yang sukarela.

Dalam penelitian ini penulis mengambil variabel proporsi Komisaris Independen, ukuran Dewan Komisaris, frekuensi rapat dewan, dan Komisaris dengan keahlian Akuntansi/keuangan dalam penelitian Liew, *et al.* (2012), dan menambah variabel *leverage* dan ukuran perusahaan. Variabel kontrol yang digunakan yaitu ukuran perusahaan (*firm size*). Pentingnya variabel kontrol yang dimasukkan ke dalam model penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris sejauh mana variabel kontrol tersebut ikut mempengaruhi mekanisme *corporate governance* terhadap penanganan manajemen risiko dengan pembentukan *Risk Management Committee* dalam sebuah perusahaan.

Penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan yang pertama adalah penelitian ini mengeliminasi beberapa variabel

dalam penelitian sebelumnya dan menambah beberapa variabel. Dalam penelitian Liew *et al* (2012) mengeliminasi variable *CEO Duality* dan *Independent Director Outside Directorships*. *CEO Duality* dieliminasi karena Indonesia menganut sistem *two tier*, dimana terdapat pemisahan fungsi eksekutif (direksi) dan fungsi pengawasan (komisaris). *Independent Director Outside Directorships* dieliminasi dengan alasan yang sama, karena perusahaan di Indonesia menganut sistem *two tier*. Penelitian ini mengalami modifikasi dengan menambah variabel *leverage* dan ukuran perusahaan karena dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan RMC. Penelitian ini juga mengklasifikasikan variabel dependen menjadi dua yaitu RMC yang tergabung dengan Komite Audit dan RMC yang terpisah dari Komite Audit.

Perbedaan yang kedua adalah tahun penelitian. Pada penelitian Liew, *et al.* (2012) tahun penelitian yang digunakan adalah tahun 2009. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tahun penelitian dari tahun 2008 sampai 2011. Diharapkan dengan 4 tahun penelitian ini dapat dilihat perkembangan RMC dalam perusahaan dari tahun ke tahun. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan go publik dari sektor non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data diambil dari Bursa Efek Indonesia karena merupakan bursa saham di Indonesia yang memiliki kelengkapan data terkini mengenai perusahaan-perusahaan publik termasuk data *annual report* dan laporan keuangannya. Sampel yang digunakan adalah perusahaan non financial karena pembentukan *Risk Management Committee* dalam sektor non financial masih bersifat sukarela (*voluntary*).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN *RISK MANAGEMENT COMMITTEE* (Studi Empiris pada Perusahaan Non Finansial yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2011).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah proporsi Komisaris Independen berpengaruh terhadap pembentukan *Risk Management Committee* (RMC) pada perusahaan non-finansial di Indonesia ?
2. Apakah ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pembentukan *Risk Management Committee* (RMC) pada perusahaan non-finansial di Indonesia ?
3. Apakah frekuensi rapat dewan berpengaruh terhadap pembentukan *Risk Management Committee* (RMC) pada perusahaan non-finansial di Indonesia ?
4. Apakah Komisaris dengan keahlian Akuntansi/keuangan berpengaruh terhadap pembentukan *Risk Management Committee* (RMC) pada perusahaan non-finansial di Indonesia ?
5. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pembentukan *Risk Management Committee* (RMC) pada perusahaan non-finansial di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh proporsi Komisaris Independen terhadap keberadaan RMC yang tergabung dan terpisah dari Komite Audit pada perusahaan di Indonesia.
2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh ukuran dewan terhadap keberadaan RMC yang tergabung dan terpisah dari Komite Audit pada perusahaan di Indonesia.
3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh frekuensi rapat dewan terhadap keberadaan RMC yang tergabung dan terpisah dari Komite Audit pada perusahaan di Indonesia.
4. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh direksi dengan keahlian akuntansi/keuangan terhadap keberadaan RMC yang tergabung dan terpisah dari Komite Audit pada perusahaan di Indonesia.
5. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh leverage terhadap keberadaan RMC yang tergabung dan terpisah dari Komite Audit pada perusahaan di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh karakteristik Dewan Komisaris dan karakteristik perusahaan terhadap pembentukan RMC baik yang tergabung maupun yang terpisah dari Komite Audit pada perusahaan non finansial, sehingga diharapkan dapat menambah literatur mengenai *Corporate Governance* di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai acuan bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas *corporate governance* yang berhubungan dengan manajemen risiko dengan membentuk RMC yang tergabung dengan Komite Audit maupun yang terpisah dari Komite Audit.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu pola penyusunan karya ilmiah untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari bab pertama hingga bab terakhir. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.
2. Bab II : Telaah Pustaka, bab ini mengemukakan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang diusulkan.

3. Bab III : Metode Penelitian, bab ini menjelaskan berbagai variabel penelitian dan definisi operasional dari masing – masing variabel tersebut, penentuan sampel, jenis dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan.
4. Bab IV : Hasil dan Pembahasan, bab ini akan menjelaskan deskripsi uji penelitian, analisis data dan pembahasan yang didasarkan atas hasil penelitian data.
5. Bab V : Penutup, bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan hubungan keagenan dimana satu pihak mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan antara *agent* (manajemen suatu usaha) dan *principal* (pemilik usaha). Di dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agen*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada *agen* untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Dengan demikian, *agen* mempunyai lebih banyak informasi daripada pemilik usaha (*asimetri informasi*).

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara *principal* dan *agent*. Asimetri informasi menimbulkan dua permasalahan yaitu *Moral Hazard* dan *Adverse Selection*, dimana permasalahan yang melekat dalam hubungan prinsipal dan *agen* dapat menimbulkan biaya keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Penerapan manajemen risiko dapat menurunkan biaya keagenan dan meningkatkan nilai perusahaan. Manajemen risiko pada perusahaan juga dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan dalam menurunkan asimetri

informasi dan berkontribusi dalam menghindari perilaku oportunistik dari manajer (Kajuter *et al.*, 2005).

Penggunaan teori agensi banyak digunakan pada penelitian penelitian sebelumnya khususnya tentang keberadaan komite yaitu Komite Audit, Komite Nominansi, Komite Remunerisasi, serta Komite Manajemen Risiko (Ruigrok, *et al.*, 2006 dan Benz dan Frey (2007) dalam Subramaniam, *et al.*, 2009). Komite-komite tersebut merupakan mekanisme pengawasan internal dalam perusahaan dan keberadaan komite pengawas yang dibentuk oleh Dewan Komisaris tersebut menyediakan kualitas pengawasan yang lebih baik dan menuntun untuk menurunkan perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajer. Komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris tersebut diperkirakan ada dalam situasi dimana biaya agensi tinggi, seperti *leverage* yang tinggi serta kompleksitas dan ukuran perusahaan yang lebih besar (Subramaniam, *et al.*, 2009).

2.1.2. Corporate Governance di Indonesia

Corporate Governance telah menjadi pokok bahasan yang penting bagi para pelaku bisnis di seluruh dunia. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan tuntutan persaingan global menjadi salah satu faktor pendorong dilakukannya reformasi GCG (Alijoyo dan Zaini, 2004). *Corporate Governance* menurut FCGI didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham, kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Menurut KNKG (2006), secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *good corporate governance* yaitu:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Penerapan *Good Corporate Governance* menurut Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN melalui SK No. Keputusan 23/M-PM.PBUMN/2000 harus berpegang pada tiga prinsip yaitu transparansi, kemandirian dan akuntabilitas. Demikian pula, Komite Nasional Kebijakan *Good*

Corporate Governance telah menetapkan *code of good corporate governance* pada Maret 2000 yang beranggotakan Ekuin, BKPM, Meneg BUMN, Menteri Hukum & Perundangan & HAM, Menperindag, Bappenas, Kadin, Perbanas, Akuntan Publik, LSM, notaris & pengacara, memberikan rekomendasi sebagai kode sektorat untuk melakukan pengawasan langsung terhadap entitas usaha dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, fairness, dan kemandirian (Raffles, n.d).

Menurut Hardikasari (2011), pemahaman mengenai konsep *Good Corporate Governance* dengan prinsip-prinsip dasar sebagaimana diuraikan di atas, pada akhirnya harus diletakkan pada tujuan dari penerapan konsep *Good Corporate Governance* itu sendiri, yaitu:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham,
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholder nonpemegang saham,
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham,
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan, dan
5. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Penerapan manajemen risiko tidak dapat dipisahkan dari *good corporate governance* dan pengendalian internal. Tata kelola perusahaan didasarkan pada kegiatan pengendalian dengan kepatutan baik (administrasi dan prosedural) dan fungsi pemantauan risiko, dengan berorientasi perilaku terhadap tujuan umum dan

koordinasi organisasi dan analisis hasil terhadap ekspektasi. Proses tata kelola perusahaan yang didukung oleh sistem pengendalian internal, mengatur pada penyediaan semua elemen keputusan penting, memberikan validitas untuk intermediasi yang fungsi antara harapan pemangku kepentingan dan perilaku manajemen; memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan internal, memastikan kelengkapan dan transparansi komunikasi dari manajemen, dan eksternal (Salvioni, 2005).

2.1.3. Risiko dan Manajemen Risiko

Risiko ada dimana-mana, datang kapan saja, dan sulit dihindari. Jika risiko menimpa suatu organisasi, maka organisasi tersebut bisa mengalami kerugian yang signifikan bahkan mengakibatkan kehancuran. Pengambilan risiko secara tradisional didefinisikan sebagai pilihan antara hasil alternative dalam kondisi ketidakpastian. Definisi ini berasal dari teori keputusan di mana risiko dikaitkan dengan kemungkinan hasil positif dan negatif (Boyne, 2003). Seiring waktu, risiko selalu dikaitkan dengan hasil negatif, dan umumnya dipandang sebagai kemungkinan hilangnya sesuatu yang bernilai (Blomkvist, 1987: 89). Risiko merupakan suatu kondisi yang menyimpang dari sasaran yang ingin dicapai, yang disebabkan oleh ketidakpastian, sehingga mempunyai dampak yang sifatnya dapat merugikan perusahaan. Vaughan (1978) mendefinisikan tentang risiko, sebagai berikut:

1. *Risk is the change of loss*, risiko diartikan sebagai kemungkinan akan terjadinya kerugian,

2. *Risk is the possibility of loss*, risiko adalah kemungkinan kerugian,
3. *Risk is Uncertainty*, risiko adalah ketidakpastian,
4. *Risk is the dispersion of actual from expected result*, risiko merupakan penyebaran hasil actual dari hasil yang diharapkan,
5. *Risk is the probability of any outcome different from the one expected*, risiko adalah probabilitas atas sesuatu outcome berbeda dengan outcome yang diharapkan.

Dari beberapa definisi diatas, maka risiko dihubungkan dengan kondisi dari ketidakpastian yang dapat menyebabkan kerugian, yang merupakan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Penyebab dari kondisi yang tidak pasti tersebut antara lain; jarak waktu dimulai perencanaan, keterbatasan informasi yang diperlukan, keterbatasan pengetahuan pengambil keputusan dan sebagainya. Konsep lain yang berkaitan dengan risiko adalah *Peril*, yaitu suatu peristiwa yang dapat menimbulkan terjadinya suatu kerugian, dan *Hazard*, yaitu keadaan dan kondisi yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu *Peril*. Dengan demikian, *hazard* lebih erat kaitannya dengan masalah kemungkinan dari pada masalah risiko, meskipun hal itu tidak dapat diabaikan dalam penanggulangan risiko (Djojosoedarso, 2003; 8-10)

Risiko yang tidak pasti dan tidak dapat diabaikan, perusahaan memerlukan tindakan penanggulangan. Maka untuk mengurangi terjadinya risiko, diperlukan pengelolaan yang baik dalam bentuk pembentukan strategi dan pengawasan operasi oleh perusahaan. Dalam bisnis, pengelolaan terhadap risiko disebut manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan

terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk: Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan /pengelolaan sumber daya (Shobrie, 2012).

Teori keagenan yang ada mengusulkan serangkaian mekanisme yang berusaha untuk mendamaikan kepentingan pemegang saham dan manajer, termasuk pemanfaatan mekanisme pengendalian internal seperti *monitoring* oleh direktur non-eksekutif (Fama dan Jensen, 1983), *monitoring* oleh pemegang saham besar (Shleifer dan Vishny, 1986), efek insentif kepemilikan saham eksekutif (Jensen dan Meckling, 1976) dan pelaksanaan pengendalian internal (Matsumura dan Tucker, 1992). Sebuah alat tambahan *monitoring* pemegang saham adalah audit dimana auditor independen memeriksa laporan tahunan kepada pemegang saham mengenai ketepatan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen (Watts dan Zimmerman, 1983).

Implikasi untuk tata kelola perusahaan dari perspektif teori keagenan adalah *monitoring* yang memadai atau mekanisme pengendalian perlu dibentuk untuk melindungi pemegang saham dari konflik kepentingan manajemen (Fama dan Jensen, 1983). Sejak skandal perusahaan dan penciptaan *code of good corporate governance*, manajemen risiko telah dianggap sebagai elemen struktur tata kelola perusahaan yang berharga.

Manajemen risiko sering disebut *Enterprise Risk Management* (Desender, 2007). Pada bulan September 2004, *The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission* (COSO) dalam Desender (2007) yang memberikan

kerangka model untuk ERM. Bahwa kerangka tersebut mendefinisikan ERM sebagai

“a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, and manage risks to be within its risk appetite, to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives.”

Nocco dan Stultz (2006) berpendapat bahwa ERM bermanfaat bagi kebanyakan perusahaan karena memungkinkan mereka untuk mengelola risiko dengan cara yang menghindari bagian yang mahal. Manajemen risiko sebagai sebuah strategi dalam perusahaan untuk meningkatkan nilai (Suranaraya, 2003 dalam Gupta, 2011), dan juga dapat meningkatkan volatilitas laba, memaksimalkan nilai pemegang saham, dan meningkatkan keamanan keuangan organisasi (Lam, 2011 dalam Gupta, 2011).

2.1.4. Risk Management Committee

Dalam pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik, organisasi membutuhkan manajemen risiko yang terintegrasi dengan kerangka kerja organisasi yang berbasis risiko (Steinmetz, 2001 dalam Pratika, 2011). Kerangka kerja organisasi dalam pengelolaan risiko adalah pembentukan suatu komite yang bertanggung jawab mengelola manajemen risiko. Dewan komisaris sebagai pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan dapat membentuk komite-komite yang membantunya dalam mengatasi masalah-masalah tertentu (FCGI, 2002).

Salah satu komite yang dibentuk Dewan Komisaris adalah Komite Audit. Peran pengawasan manajemen risiko pada umumnya dibebankan kepada Komite Audit (Krus dan Orowitz, 2009). Dalam Pedoman Pembentukan Komite Audit

yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Corporate Governance tahun 2002, menyatakan bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab komite audit adalah mengenai manajemen risiko dan kontrol perusahaan yang didalamnya juga mencakup identifikasi risiko dan evaluasi risiko untuk meminimalkan risiko.

Pengamanatan tugas tersebut tercantum dalam keputusan ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 menyatakan bahwa salah satu peran dan tanggung jawab Komite Audit adalah mengenai manajemen risiko dan pengendalian perusahaan. Namun perusahaan memerlukan suatu komite yang dapat memberikan perhatian secara penuh pada pengawasan risiko dan fokus tidak terbagi pada pemenuhan standar akuntansi agar mekanisme pengawasan risiko perusahaan dapat berjalan efektif (Krus dan Orowitz, 2009). Pentingnya pengawasan terhadap risiko dan peningkatan risiko bisnis yang dihadapi perusahaan menjadi salah satu faktor yang mendorong perusahaan untuk membentuk *Risk Management Committee*.

Risk Management Committee didefinisikan sebagai komite dibawah dewan komisaris yang memberikan pendidikan manajemen risiko pada tingkat dewan mengenai identifikasi dan strategi risiko yang tepat, implementasi pengelolaan risiko, dan *review* pelaporan risiko perusahaan (KPMG, 2001). RMC dalam pembentukannya terdiri dari RMC yang tergabung dengan Komite Audit dan RMC yang berdiri sendiri (terpisah dari Komite Audit). RMC yang berdiri sendiri memiliki pengendalian intern yang lebih tinggi daripada jika bergabung dengan Komite Audit. RMC yang tergabung dengan Komite Audit memiliki tugas pengawasan manajemen risiko, selain itu juga terlibat aktif dalam pelaporan

keuangan dan pengawasan fungsi audit (Alles, *et al.*, 2005 dalam Tazilah dan Rashidah, 2010).

Keberadaan RMC merupakan salah satu elemen untuk mendukung tercapainya prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Guna mencapai prinsip GCG, maka diperlukan pengawasan dan pengelolaan risiko yang efektif yang disebut manajemen risiko. Perusahaan perlu membentuk RMC untuk menangani masalah risiko sebagai bentuk pemenuhan GCG.

2.1.5. Risk Management Committee pada Sektor Perbankan

Risk Management Committee di sektor perbankan telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/PBI/2003. Dalam peraturan tersebut disebutkan Komite Manajemen Risiko adalah komite yang terdiri dari Direktur dan pejabat eksekutif terkait yang bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko dan juga bertanggung jawab dalam perbaikan dan penyempurnaan.

2.1.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Risk Management Committee

2.1.6.1. Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan mekanisme yang penting dalam pengawasan perilaku manajemen, baik dalam akuntabilitas perseroan maupun *disclosure*. Komisaris independen merupakan orang independen dalam jajaran dewan komisaris yang dapat mewakili kepentingan pemegang saham, sehingga komisaris independen dapat menambah

kualitas *monitoring* dalam perusahaan (Pincus, *et al.*, 1989). Fama dan Jensen (1983) menunjukkan bahwa Komisaris Independen memiliki kemampuan *monitoring* yang lebih besar atas manajemen.

Di Indonesia proporsi Komisaris Independen dalam jajaran Dewan Komisaris telah diatur dalam Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No: Kep-305/BEJ/07-2004 yang menyebutkan tentang jumlah Komisaris Independen secara proporsional harus sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh yang bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang – kurangnya 30% (tigapuluh persen) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris. Jumlah tersebut dianggap dapat mewakili kepentingan pemegang saham.

2.1.6.2. Ukuran Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris menurut pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Dalam suatu perusahaan, jumlah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris berbeda – beda (Indrayati, 2010). Jumlah Dewan Komisaris yang efektif harus tidak boleh terlalu kecil atau terlalu besar. Karena jumlah Dewan Komisaris tidak mempunyai ukuran yang cocok, banyak ide-ide disajikan oleh pembuat kebijakan tentang ukuran dewan yang tepat.

Pembuat kebijakan GCG berpendapat bahwa perusahaan dengan Dewan Komisaris yang kecil memiliki kinerja yang lebih baik (Lipton dan Lorsch, 1992). Menurut Reeb dan Upadhyay (2007), perusahaan dengan jumlah Dewan Komisaris yang kecil cenderung memiliki ruang sosial yang sempit. Sebaliknya, Dalton, *et al.* (1999) berpendapat bahwa ukuran Dewan Komisaris yang besar memungkinkan masuknya Komisaris dengan keterampilan, pengalaman, dan profesi yang berbeda. Lipton dan Lorsch (1992) merekomendasikan bahwa ukuran dewan yang ideal tidak boleh melebihi delapan atau sembilan Dewan Komisaris.

Ukuran Dewan Komisaris akan berdampak terhadap kualitas keputusan dan kebijakan yang telah dibuat dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan organisasi (Syakhroza, 2004 dalam Kusuma, 2012). Ukuran dewan yang terlalu kecil atau terlalu besar akan berdampak pada kualitas pengambilan keputusan yang rendah dan memperlemah pengawasan.

2.1.6.3. Frekuensi Rapat Dewan

Salah satu tanggung jawab dewan komisaris adalah menghadiri pertemuan dan dengan demikian mereka akan memiliki hak istimewa untuk mengambil keputusan (Ronen & Yaari, 2008). Conger *et al.* (1998) mengemukakan bahwa rapat dewan yang lebih sering akan meningkatkan efektivitas dewan. Pertemuan rapat adalah dimensi penting dari pembahasan seluruh rencana dan evaluasi perusahaan (Vafeas, 1999) dan merupakan indikator keefektifan dalam jajaran Dewan Komisaris tersebut

(Ronen & Yaari, 2008). Dewan Komisaris yang aktif memenuhi rapat, lebih mungkin untuk melakukan tugas mereka sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Vafeas, 1999).

Rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh Dewan Direksi dan implementasinya (Waryanto, 2010). Cotter, *et al.* (1998) dalam Juwitasari (2008), frekuensi rapat yang tinggi akan menghasilkan *monitoring* yang baik dari dewan, maka anggota secara tidak langsung akan meminta rapat dewan untuk diadakan lebih sering untuk menambah kemampuan mereka dalam memonitor manajemen.

2.1.6.4. Komisaris dengan Keahlian Akuntansi/Keuangan

Komisaris yang memiliki keahlian Akuntansi/keuangan memiliki keunggulan kompetitif dan dapat meningkatkan efektivitas peran Dewan Komisaris dalam memfasilitasi tugas identifikasi risiko dan penilaian risiko, yang mengarah ke perbaikan sistem manajemen risiko. Penelitian awal pada hubungan antara manajemen risiko dan latar belakang keuangan anggota dewan, menunjukkan Dewan Komisaris dan Komite Audit yang memiliki pengalaman dibidang Akuntansi/keuangan cenderung untuk memainkan peran aktif dalam manajemen risiko (Liew et al., 2012).

2.1.6.5. Leverage

Menurut Brigham dan Houston (2006), *leverage* adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang. Semakin

besar rasio *leverage* maka semakin buruk keadaan keuangan sebuah perusahaan, hal ini disebabkan semakin besarnya pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang, jadi semakin tinggi pula risiko keuangan yang akan ditanggung oleh perusahaan dan sebaliknya apabila rasio *leverage* rendah maka risiko keuangan atau risiko kegagalan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman akan semakin rendah (Utomo, 2012).

Tingginya level utang cenderung membuat perusahaan untuk membentuk komite (Chen *et al.* 2009), jadi semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan membuat perusahaan cenderung membentuk *Risk Management Committee* untuk menangani secara khusus manajemen risiko (Andarini, 2010).

2.1.6.6. Ukuran Perusahaan

Perusahaan besar cenderung menerapkan *corporate governance* dengan lebih baik daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar menyadari bahwa komitmen terhadap *corporate governance* mampu meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan besar juga memiliki potensi risiko kebangkrutan lebih besar apabila tidak dikelola dengan baik

Ukuran perusahaan diukur dengan total asset yang menggambarkan total sumberdaya yang dimiliki perusahaan dari aktivitas operasi dan investasi. Semakin besar total asset, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang membahas tentang pembentukan RMC di dalam suatu perusahaan masih belum banyak dilakukan. Hal ini dikarenakan RMC merupakan isu yang masih baru dan pembentukan RMC di perusahaan non finansial di Indonesia masih bersifat sukarela, berbeda dengan perusahaan yang bergerak di sektor perbankan dimana pembentukan RMC sudah dimandatkan.

Penelitian Yatim (2009) menganalisis hubungan karakteristik Komite Audit terhadap pembentukan RMC pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia. Sebanyak 690 perusahaan non finansial yang terdaftar di tahun 2003 digunakan sebagai sampel. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa independensi, ukuran, dan ketekunan Komite Audit secara signifikan berhubungan positif dengan pembentukan RMC.

Penelitian Andarini dan Januarti (2010) menguji hubungan karakteristik Dewan Komisaris (proporsi Komisaris Independen dan ukuran dewan) dan karakteristik perusahaan (reputasi auditor, kompleksitas, risiko pelaporan keuangan, *leverage*, dan ukuran perusahaan) terhadap pengungkapan RMC. Penelitian ini menggunakan sampel 248 perusahaan non-finansial yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007-2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya ukuran perusahaan secara signifikan berhubungan positif dengan keberadaan RMC dan SRMC.

Penelitian Wahyuni dan Harto (2012) menguji pengaruh tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan terhadap keberadaan Komite Manajemen Risiko (RMC) dan jenis RMC, apakah itu dipisahkan dan dikombinasikan dengan

komite audit. Variabel yang terurai menjadi Komisaris Independen, frekuensi pertemuan, jenis kepemilikan, reputasi auditor, ukuran anak perusahaan, risiko pasar, *leverage*, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa variabel independen berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC antara lain, anak perusahaan, dan ukuran perusahaan. Sedangkan variabel independen yang berpengaruh positif terhadap keberadaan dari RMC terpisah adalah pertemuan frekuensi dan ukuran perusahaan.

Penelitian Liew, *et al.* (2012) menganalisis pada pembentukan RMC secara sukarela yang dipengaruhi oleh karakteristik Dewan Komisaris pada perusahaan yang terdaftar di *Main Market* Malaysia tahun 2009. Sampel yang digunakan sebanyak 797 perusahaan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ukuran dewan dan *Independent Director Outside Directorships* yang berhubungan positif dengan pembentukan RMC yang sukarela.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Liew, *et al.* (2012). Penelitian ini mengalami modifikasi yaitu mengeliminasi beberapa variabel pada penelitian terdahulu dan menambah beberapa variabel yang memiliki keterkaitan dengan pembentukan RMC, dan perubahan sampel yang telah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan tempat penelitian di Indonesia.

Ringkasan penelitian terdahulu mengenai pembentukan *Risk Management Committee* ditampilkan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
Yatim (2009)	Audit Committee Characteristics And Risk Management Of Malaysian Listed Firms	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen: <i>Risk Management Committee</i> • Variabel Independen: Independensi, keahlian, keuangan, ukuran, ketekunan Komite Audit 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan RMC berhubungan positif dengan independensi, ukuran, dan ketekunan komite audit
Yatim (2010)	Board Structures and The Establishment	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen: Pembentukan RMC • Variabel Independen: Proporsi Komisaris Independen, CEO Independen, keahlian dewan, kerajinan dewan 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi komisaris independen dan CEO independen berpengaruh positif dengan RMC yang berdiri sendiri. • Dewan dengan keahlian dan kerajinan yang tinggi berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC.
Andarini dan Januarti (2010)	Hubungan Karakteristik Dewan Komisaris dan Perusahaan terhadap Pengungkapan Risk Management Committee pada Perusahaan Go Publik di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen: Keberadaan RMC dan RMC terpisah dari Komite Audit • Variabel Independen: Proporsi Komisaris Independen, ukuran dewan, auditor eksternal perusahaan, kompleksitas, risiko pelaporan keuangan, <i>leverage</i>, dan ukuran perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran perusahaan secara signifikan positif dan signifikan dengan keberadaan RMC dan RMC yang terpisah dari Komite Audit.
Tazilah dan Rahman (2010)	Risk Management & Corporate Governance Characteristics in the Malaysian	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen: Pembentukan RMC yang terpisah dan tergabung dengan Komite Audit • Variabel Independen: 	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris independen dan ukuran dewan berpengaruh positif dengan pembentukan RMC

	Islamic Financial Institutions	Karakteristik Dewan Komisaris: Dewan Independen, Direktur Non Eksekutif, Ukuran dewan. Karakteristik Dewan Syariah: Pendidikan, Ukuran Dewan Syariah	
Liew et al (2012)	Board of Directors and Voluntary Formation of Risk Management Committee : Malaysia Evidence	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen: <i>Risk Management Committee</i> • Variabel Independen: Proporsi Komisaris Independen, CEO <i>Duality</i>, Ukuran Dewan, <i>Independent Director Outside Directorships</i>, Rapat Dewan, Komisaris dengan keahlian Akuntansi/keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran dewan dan <i>Independent Director Outside Directorships</i> berhubungan positif dengan pembentukan RMC yang sukarela.
Wahyuni dan Harto (2012)	Analisis Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen: Komite Manajemen Risiko • Variabel Independen: Komisaris Independen, Frekuensi pertemuan, Jenis kepemilikan, Reputasi auditor, Ukuran anak perusahaan, Risiko pasar, <i>Leverage</i>, Usia perusahaan, dan Ukuran perusahaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran anak perusahaan, dan ukuran perusahaan. berpengaruh positif terhadap keberadaan frekuensi pertemuan RMC, • Variabel independen yang berpengaruh positif terhadap keberadaan dari RMC terpisah adalah pertemuan frekuensi dan ukuran perusahaan.

Sumber: review dari berbagai sumber

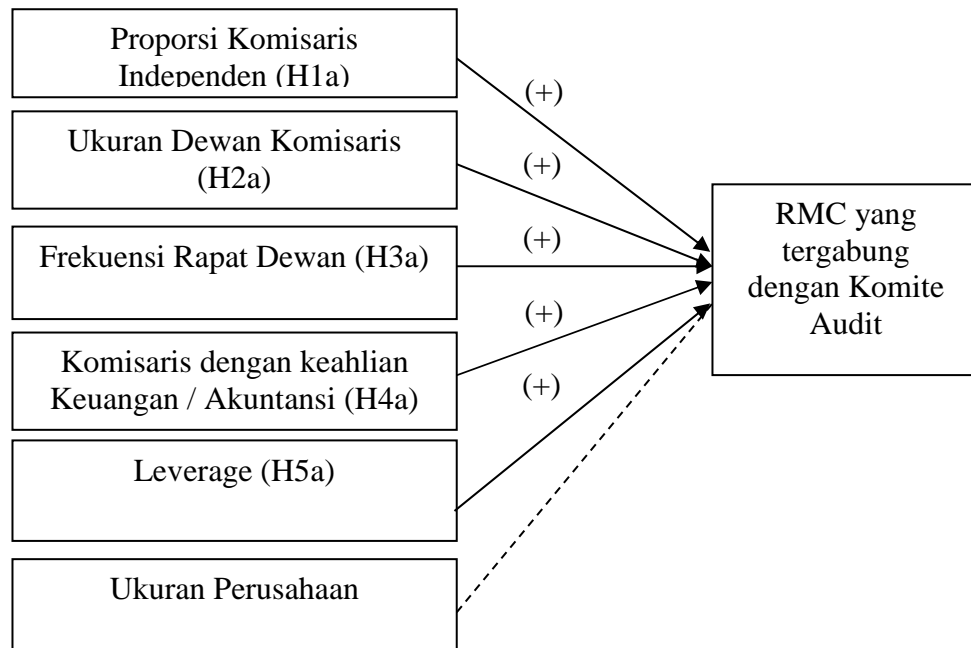
2.3. Kerangka Pemikiran

Risk Management Committee merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari peran Dewan Komisaris dalam tugas pengawasan risiko. *Risk Management Committee* sendiri merupakan komite yang berdiri sendiri dan terpisah dari Komite Audit, walaupun masih ada perusahaan yang memandatkan tugas pengawasan manajemen risiko kepada Komite Audit.

Penelitian ini memiliki dua kerangka pemikiran untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan RMC dan jenis RMC, baik RMC yang tergabung dengan Komite Audit (RMC) dan RMC yang terpisah dengan Komite Audit (SRMC). Kerangka pemikiran pertama meneliti pembentukan RMC di perusahaan, sedangkan kerangka pemikiran kedua merupakan cabang dari kerangka penelitian pertama yang menerangkan pembentukan RMC terpisah dari Komite Audit. Berdasarkan telaah pustaka dan penelitian terdahulu, variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu proporsi Komisaris Independen, ukuran Dewan Komisaris, frekuensi rapat Dewan Komisaris, Komisaris dengan keahlian Akuntansi/Keuangan, dan *leverage*. Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi pembentukan RMC ialah ukuran perusahaan.

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran I

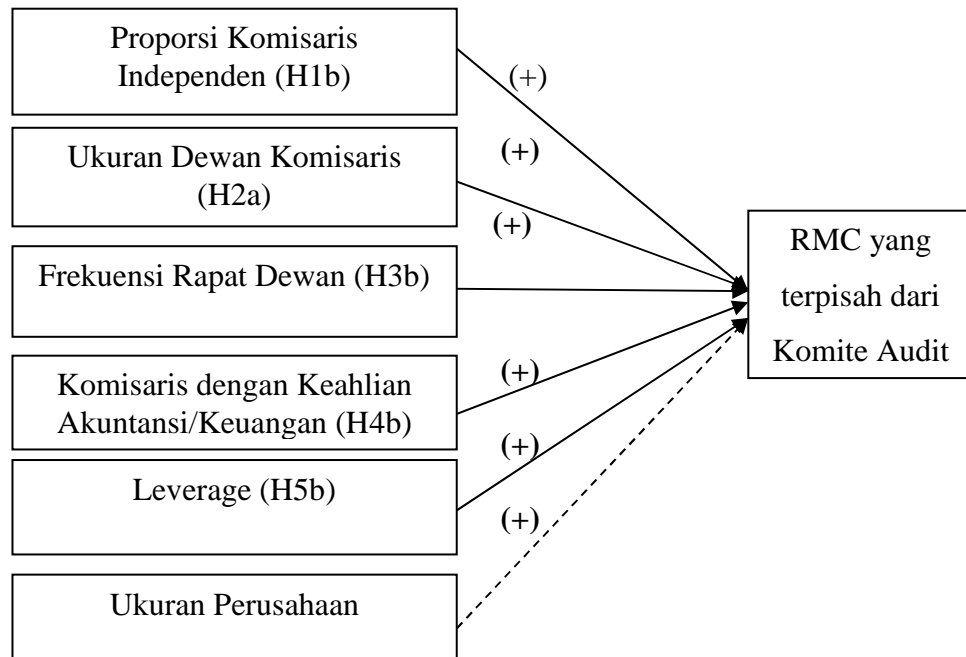


Keterangan :

—————▶ = variabel independen

- - - - -▶ = variabel kontrol

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran II



Keterangan :

—————> = variabel independen

-----> = variabel kontrol

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Pembentukan RMC

Teori keagenan merupakan teori yang menghubungkan *principal* dengan *agent* sehingga memungkinkan terhindarnya asimetri informasi. Dalam teori keagenan semakin banyak jumlah anggota Komisaris yang

independen, maka semakin tinggi kualitas pengawasan terhadap Direktur Eksekutif.

Dalam *corporate governance* dan prakteknya telah menekankan pentingnya menjaga independensi untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan mengurangi kemungkinan oportunistik perilaku manajerial (Liew, *et al.*, 2012). Proporsi Komisaris Independen di dalam suatu dewan merupakan sebuah indikator independensi dari dewan. Sebuah dewan dengan proporsi Komisaris Independen yang tinggi cenderung untuk menyediakan pengawasan yang lebih besar pada aktivitas manajemen risiko perusahaan (Yatim, 2009). Desender (2007) menyebutkan bahwa Komisaris Independen tidak memiliki hubungan kepentingan pribadi dan kepegawaian dengan perusahaan. Dengan demikian, mereka lebih dapat mewakili kepentingan pemegang saham.

Fama dan Jensen (1983) berpendapat bahwa Komisaris Independen dengan jumlah yang lebih tinggi cenderung dapat meningkatkan kualitas pengawasan. Komisaris Independen yang lebih besar akan lebih memperhatikan risiko yang dihadapi perusahaan, sehingga mereka diharapkan dapat memilih struktur manajemen risiko yang komprehensif dalam rangka untuk melengkapi tanggung jawab pengawasan mereka (Beasley, *et al.*, 2005) dengan membentuk RMC.

Penelitian Yatim (2009) menunjukkan bahwa dewan dengan proporsi Komisaris Independen yang besar cenderung untuk membentuk RMC untuk meningkatkan kemampuan pengawasan mereka. Selain itu,

sebuah dewan dengan proporsi Komisaris Independen yang besar akan lebih menyukai RMC yang berdiri sendiri atau terpisah dari Komite Audit karena pembentukan RMC yang terpisah akan lebih terfokus pada kebijakan dan prosedur manajemen risiko pada perusahaan. Jika pengaruh proporsi Komisaris Independen semakin besar maka pembentukan RMC yang terpisah semakin kuat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1(a) : Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif dengan pembentukan RMC yang tergabung dengan Komite Audit.

H1(b) : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif dengan pembentukan RMC yang terpisah dengan Komite Audit.

2.4.2. Pengaruh Ukuran Dewan terhadap Pembentukan RMC

Ukuran dewan diyakini sebagai aspek pengambilan keputusan yang efektif. Ukuran Dewan Komisaris yang lebih besar akan memberikan kekuatan dalam fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan teori agensi, Dewan Komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak (Sembiring, 2005). Subramaniam, *et al.* (2009) mengemukakan bahwa komite-komite yang dibentuk Dewan Komisaris seperti Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dipastikan akan selalu ada pada situasi *agency cost* yang tinggi, seperti *leverage* yang tinggi dan ukuran perusahaan yang lebih besar. Hal ini mendorong Dewan

Komisaris membentuk RMC, sehingga dengan ukuran dewan yang besar diharapkan dapat membantu kinerja Dewan Komisaris menerapkan manajemen risiko dan mengawasi kinerja *agent* agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang telah diberikan oleh *principal*. Semakin besar jumlah anggota Dewan Komisaris, semakin mudah untuk mengendalikan Chief Executives Officer (CEO) dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen (Coller dan Gregory, 1999). Hal ini juga merupakan mekanisme *corporate governance* yang penting untuk mengurangi biaya keagenan yang akan timbul (Dyaksa, 2012).

Menurut Zahra dan Pearce (1989) dan Coles *et al* (2008) dalam penelitian Liew, *et al.* (2012), kinerja perusahaan dapat dilihat dari ukuran dewan yang besar. Sebuah ukuran dewan yang besar dan terdiversifikasi kemampuannya akan memiliki kesempatan untuk menilai dan mengevaluasi informasi risiko yang dihadapi perusahaan, serta dapat memiliki kesempatan untuk mengkoordinir dan menjadi terlibat dalam komite-komite yang akan dibentuk Dewan Komisaris salah satunya terlibat dalam manajemen risiko (Subramaniam, *et al.*, 2009). Oleh karena itu, ukuran dewan yang besar dengan tingkat sumber daya yang ditawarkan memungkinkan Dewan Komisaris membentuk RMC baik yang terpisah dari Komite Audit maupun yang tergabung dengan Komite Audit. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diusulkan berikut ini:

H2(a) : Ukuran dewan berpengaruh positif dengan pembentukan RMC yang tergabung dengan Komite Audit.

H2(b) : Ukuran dewan berpengaruh positif dengan pembentukan RMC yang terpisah dengan Komite Audit.

2.4.3. Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan terhadap Pembentukan RMC

Frekuensi rapat dewan berhubungan dengan ukuran waktu pertemuan antar dewan. Dalam teori keagenan, semakin sering waktu pertemuan maka Dewan Komisaris dapat mengontrol aktivitas perusahaan sehingga perusahaan dapat menghindari risiko dan mencapai tujuannya.

Menurut Byrne (1996) dalam penelitian Liew, *et al.* (2012), intensitas rapat dewan berdampak terhadap keefektifan pengambilan keputusan dan secara potensial akan meningkatkan komunikasi antara direksi dan fungsi *internal control*. Intensitas aktivitas dewan seperti pertemuan dewan akan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen yang dapat merugikan perusahaan maupun *principal*. Selain itu, Carcello *et al* (2002) berpendapat Komite Audit dipandang efektif dalam pelaporan pengawasan perusahaan hanya jika mereka bertemu secara teratur. Dengan frekuensi rapat yang semakin tinggi, maka kemungkinan Dewan Komisaris untuk lebih memperhatikan risiko dan manajemen risiko yang akan diterapkan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan level pengawasan dan aktivitas manajemen risiko. Dengan demikian, semakin sering dewan menyelenggarakan rapat maka akan mendukung pembentukan RMC baik yang tergabung dengan Komite Audit maupun RMC yang terpisah.

Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H3(a) : Frekuensi rapat dewan berpengaruh positif dengan pembentukan RMC yang tergabung dengan Komite Audit.

H3(a) : Frekuensi rapat dewan berpengaruh positif dengan pembentukan RMC yang terpisah dengan Komite Audit.

2.4.4. Pengaruh Komisaris dengan Keahlian Akuntansi/Keuangan terhadap Pembentukan RMC

Teori keagenan menekankan pentingnya penyerahan wewenang pengelolaan perusahaan dari pemilik kepada pihak lain yang mampu menjalankan perusahaan dengan lebih baik. Dengan pengalihan wewenang kepada komisaris yang kemampuan sesuai bidangnya, maka akan meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian perusahaan.

Risiko pada perusahaan erat kaitannya dengan tingkat *leverage* yang tinggi, kompleksitas dan ukuran perusahaan yang lebih besar. Menurut Liew, *et al.* (2012), keahlian Dewan Komisaris penting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. Anggota dewan yang memiliki keahlian dan pengalaman akuntansi/keuangan dapat meningkatkan efektivitas peran Dewan Komisaris karena dapat memfasilitasi tugas identifikasi risiko dan penilaian risiko, yang mengarah ke perbaikan sistem manajemen risiko (Desender, 2009 dalam Liew, *et al.*, 2012), selain itu Dewan Komisaris dengan Keahlian Akuntansi/Keuangan dapat memberikan sumberdayanya

untuk mengkoordinasi dan ikut berperan dalam komite-komite yang dibentuk Dewan Komisaris termasuk dalam tugas manajemen risiko. Dewan komisaris dan Komite Audit yang memiliki keahlian akuntansi/ keuangan dapat berkontribusi dalam pengawasan kinerja manajemen untuk menghindari kerugian yang diakibatkan oleh tindakan manajemen untuk melindungi perusahaan dan kepentingan *principal*. Sehingga Komisaris dengan keahlian Akuntansi/Keuangan dapat memainkan peran aktif dalam manajemen risiko, sehingga diharapkan dapat mendukung pembentukan RMC baik yang tergabung dengan Komite Audit maupun RMC yang terpisah. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis yang akan diajukan sebagai berikut:

H4(a) : Komisaris dengan keahlian Akuntansi/keuangan berpengaruh positif dengan pembentukan RMC yang tergabung dengan Komite Audit.

H4(b) : Komisaris dengan keahlian Akuntansi/keuangan berpengaruh positif dengan pembentukan RMC yang terpisah dengan Komite Audit.

2.4.5. Pengaruh *Leverage* terhadap Pembentukan RMC

Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Jensen dan Meckling, 1976).

Perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi cenderung memiliki utang dan risiko yang tinggi. Semakin lama jatuh tempo utang semakin besar pula risiko tidak dikembalikan atau perubahan kondisi selama jangka waktu utang dan akan berdampak pada para pemegang saham sebagai *principal*. Hal ini akan mendorong pembentukan RMC sebagai mekanisme pengendalian internal yang tepat dan fungsi pengawasan risiko yang lebih efektif. Pembentukan RMC dapat meningkatkan kepercayaan kreditor dan pemegang saham, serta dapat membantu pengawasan dalam risiko laporan keuangan, sehingga dapat berjalan lebih efektif. Berdasar penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

- H5(a) : *Leverage* berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC yang tergabung dengan Komite Audit.**
- H5(b) : *Leverage* berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC yang terpisah dengan Komite Audit.**

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel terikat atau dependen baik secara positif maupun negatif, sedangkan variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen dan merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti.

Penelitian ini menguji faktor – faktor yang mempengaruhi pembentukan RMC dan SRMC dengan indikator proporsi Komisaris Independen, ukuran dewan, frekuensi rapat dewan, Komisaris dengan keahlian Akuntansi/keuangan, dan leverage. Variabel independen dari penelitian ini adalah proporsi Komisaris Independen, ukuran dewan, frekuensi rapat dewan, Komisaris dengan keahlian Akuntansi/keuangan, dan *leverage*, sedangkan Variabel dependen yang digunakan yaitu *Risk Management Committee* (RMC) yang tergabung dari Komite Audit dan RMC yang terpisah dari Komite Audit (SRMC). Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan.

3.1.2 Definisi Operasional

3.1.2.1 Risk Management Committee (RMC)

Risk Management Committee (RMC) merupakan suatu komite yang memberikan perhatian penuh pada pengawasan risiko dan tidak berbagi fokus pada pemenuhan standar akuntansi (Krus dan Orowitz, 2009). Keberadaan RMC sangat penting sebagai best practice dalam penerapan *good corporate governance* (Fox, *et al.*, 2011). Di Indonesia, tanggungjawab pengawasan risiko pada perusahaan sebagian masih dibebankan pada Komite Audit, namun bagi perusahaan yang sadar akan besarnya tanggung jawab komite audit dan mengetahui pentingnya pengelolaan risiko maka perusahaan membentuk RMC.

1. Pembentukan RMC yang tergabung dengan Komite Audit (RMC)

Dalam penelitian ini pembentukan RMC diukur menggunakan variabel *dummy*. Kategori 1 diberikan kepada perusahaan yang membentuk RMC yang tergabung dengan komite audit, sedangkan kategori 0 diberikan kepada perusahaan yang tidak mengungkapkan pembentukan RMC yang tergabung dengan komite audit.

2. Pembentukan RMC yang terpisah dengan Komite Audit (SRMC)

RMC yang terpisah merupakan RMC yang pembentukannya berdiri sendiri dan terpisah dari Komite Audit. Dalam penelitian ini pembentukan RMC diukur menggunakan variabel *dummy*. Kategori 1 diberikan kepada perusahaan yang membentuk RMC yang terpisah dengan Komite Audit, sedangkan kategori 0 diberikan kepada perusahaan yang tidak mengungkapkan pembentukan RMC yang terpisah dengan Komite Audit.

3.1.2.2 Proporsi Komisaris Independen

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga untuk menjaga “fairness” serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan para stakeholders lainnya (Alijoyo dan Zaini, 2004).

Berdasarkan Pedoman Good Corporate Governance, komposisi atau jumlah Komisaris Independen tidak ditentukan dalam jumlah tertentu namun demikian jumlah atau komposisi Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun Pedoman *Good Corporate Governance* tidak menentukan jumlah Komisaris Independen, dalam Peraturan Bapepam-LK, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen sedangkan Bursa Efek Indonesia mewajibkan sekurang-kurangnya 30% dari Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Dalam penelitian ini, independensi Dewan Komisaris diukur dengan rasio jumlah anggota Komisaris Independen terhadap jumlah total anggota Dewan Komisaris.

3.1.2.3 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran Dewan Komisaris dalam perusahaan mengacu pada jumlah anggota Dewan Komisaris yang dialokasikan untuk mengawasi perusahaan. Menurut pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia, jumlah anggota Dewan Komisaris harus sesuai dengan kompleksitas perusahaan dan tetap

memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Dalam perusahaan sektor finansial jumlah anggota Dewan Komisaris telah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan No. 152/PMK.010/2012, PBI No. 8/4/PBI/2006 yang mengatur tentang pedoman GCG menyatakan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya tiga orang atau paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Ukuran Dewan Komisaris akan berdampak terhadap kualitas keputusan dan kebijakan yang telah dibuat dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan organisasi (Syakhroza, 2004). Ukuran dewan diukur dengan menjumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Liew, *et al.*, 2012).

3.1.2.4 Frekuensi Rapat Dewan

Keefektifan dari dewan dapat dipengaruhi oleh frekuensi meeting, frekuensi rapat yang tinggi dapat menghasilkan monitoring yang lebih baik. Dalam Peraturan Menteri BUMN No. 20 PER-01-MBU-2011, rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat mengundang Direksi. Dalam penelitian ini, variabel ini diukur secara numeral dan frekuensi rapat Dewan Komisaris diukur dengan jumlah rapat yang diselenggarakan selama satu tahun (Liew, *et al.*, 2012).

3.1.2.5 Komisaris dengan Keahlian Akuntansi/Keuangan

Komisaris dengan keahlian Akuntansi/keuangan akan berdampak positif pada keefektifan organisasi. Desender (2009) menunjukkan bahwa anggota dewan yang memiliki keahlian keuangan dan pengalaman meningkatkan efektivitas peran Dewan Komisaris. Pemahaman ini memfasilitasi tugas identifikasi risiko dan penilaian risiko, yang mengarah ke perbaikan sistem manajemen risiko. Komisaris dengan keahlian Akuntansi/keuangan dapat memahami laporan keuangan dengan baik dan kemungkinan mendeteksi masalah dan risiko.

Komisaris dengan keahlian Akuntansi/keuangan diukur dengan latar belakang pendidikan di bidang Akuntansi dan keuangan, pengalaman dibidang Akuntansi dan keuangan, mempunyai jabatan dibidang Akuntansi dan keuangan (Liew, *et al.*, 2012). Komisaris harus dapat menjamin bahwa mekanisme pengawasan berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam penelitian ini, Komisaris dengan latar belakang Akuntansi/keuangan diukur dengan rasio jumlah Komisaris dengan latar belakang Akuntansi atau keuangan terhadap jumlah anggota Dewan Komisaris.

3.1.2.6 Leverage

Leverage adalah rasio yang menunjukkan seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang dalam memenuhi aktivitya. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi akan membuat keadaan keuangan perusahaan menjadi memburuk, hal

ini disebabkan semakin besarnya pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang, jadi semakin tinggi pula risiko keuangan yang akan ditanggung oleh perusahaan.

Leverage dalam penelitian ini diukur dengan proporsi total utang dibagi total asset. Dengan rumus sebagai berikut :

$$LEV = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}}$$

3.1.2.7 Ukuran Perusahaan (Variabel Kontrol)

Ukuran perusahaan dapat menggambarkan besar kecilnya skala ekonomi suatu perusahaan. Pada penelitian ini ukuran perusahaan diukur dari jumlah total aset perusahaan sampel. Diukur dengan menggunakan log (ln) dari total asset perusahaan (Yatim, 2009)

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah dari keseluruhan kelompok individu yang menarik perhatian peneliti untuk diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2008-2011.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dinilai dapat mewakili karakteristiknya. dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Perusahaan non finansial yang terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai dari tahun 2008 - 2011.
- b. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan pada periode 2008 –2011.

- c. Terdapat kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dari tahun 2008 - 2011.

3.3 Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan non finansial tahun 2008-2011. Sumber data yang digunakan berasal dari publikasi laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang berasal dari pojok BEI Universitas Diponegoro dan data *annual report* dan laporan keuangan yang diakses dari situs resmi BEI www.idx.co.id.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa *annual report* dan laporan keuangan auditan dari perusahaan non finansial yang listing dan dipublikasikan oleh BEI pada tahun 2008-2011.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, nilai maksimum, nilai minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (Ghozali, 2011).

3.5.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. (Ghozali, 2011) Multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dengan menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya Multikolinieritas.

3.5.3 Uji Regresi Logistik

Gujarati dalam Ghozali (2011) berpendapat analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.

Dalam penelitian ini menggunakan regresi logistik (logistic regression), sebenarnya sama dengan analisis regresi berganda, hanya variabel terikatnya merupakan variabel *dummy* (0 dan 1). Regresi logistik tidak memerlukan asumsi normalitas, meskipun screening data outliers tetap dapat dilakukan.

Persamaan Regresi Logistik dalam penelitian ini adalah :

$$\text{Logit(RMC)} = \alpha + \beta_1(\text{INDDIR}) + \beta_2(\text{BRDSIZE}) + \beta_3(\text{MEETING}) + \beta_4(\text{EXPERT}) + \beta_5(\text{LEV}) + \beta_6(\text{SIZE}) + e$$

$$\text{Logit(SRMC)} = \alpha + \beta_1(\text{INDDIR}) + \beta_2(\text{BRDSIZE}) + \beta_3(\text{MEETING}) + \beta_4(\text{EXPERT}) + \beta_5(\text{LEV}) + \beta_6(\text{SIZE}) + e$$

Keterangan :

Risk Management Committee (RMC) = Variabel dummy pembentukan/keberadaan RMC, dimana

1. Logit(RMC) Kode 1 untuk perusahaan RMC dan kode 0 untuk perusahaan non RMC

2. Logit(SRMC) Kode 1 untuk perusahaan RMC yang terpisah dan kode 0 untuk RMC yang tergabung dengankomite audit.

Proporsi Komisaris Independen (INDDIR) = Rasio jumlah anggota komisaris independen dalam dewan komisaris / jumlah anggota dewan komisaris

Ukuran Dewan (BRDSIZE)	=	Jumlah anggota dewan komisaris.
Frekuensi Rapat Dewan (MEETING)	=	Jumlah rapat dewan yang diselenggarakan selama setahun.
Komisaris dengan Keahlian Akuntansi/keuangan (EXPERT)	=	Rasio jumlah anggota dewan yang mempunyai keahlian akuntansi dan keuangan / jumlah anggota dewan komisaris
<i>Leverage</i> (LEV)	=	Rasio total hutang dibagi total aset.
Ukuran Perusahaan (SIZE)	=	Natural logaritma dari total asset

Regresi logistik merupakan model regresi yang sudah mengalami modifikasi dari regresi berganda. Penentuan signifikansi pada model regresi logistic terdapat kondisi yang perlu diperhatikan dari model output. Kondisi-kondisi tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Test*)

Hosmer and Lemeshow 's Goodness of Fit Test menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit).

Jika nilai *Hosmer and Lemeshow* test statistic sama dengan atau kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga pengujian ini tidak baik karena tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai *Hosmer and Lemeshow* test lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol diterima yang berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau model dapat diterima.

2. Uji Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Fit Model Test*)

Pengujian kelayakan keseluruhan model dengan menggunakan tes statistic *chi-square* yang digunakan berdasarkan pada fungsi likelihood. Likelihood L dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. L ditransformasikan menjadi $-2\text{Log}L$ untuk menguji hipotesis nol dan alternatif. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2Log Likelihood ($-2LL$) pada awal ($\text{Block Number} = 0$) dengan nilai -2Log Likelihood ($-2LL$) pada akhir ($\text{Block Number} = 1$). Adanya pengurangan nilai antara $-2LL$ awal (*initial -2LL function*) dengan nilai $-2LL$ pada langkah berikutnya ($-2LL$ akhir) menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 2011).

3. Koefisien Determinasi (*Cox and Snell's R Square dan Nagelkerke's R Square*)

Cox dan Snell's R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran R^2 pada multiple regression yang didasarkan pada teknik estimasi

likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1 sehingga sulit diinterpretasikan. *Nagelkerke's R Square* merupakan modifikasi dari koefisien *Cox and Snell's R Square* untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai *Cox and Snell's R²* dengan nilai maksimumnya.

4. Matrik Klarifikasi

Matrik klarifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kebenaran keberadaan RMC dan SRMC di suatu perusahaan. Pada kolom 2X2 merupakan dua nilai prediksi dari variable dependen dalam hal ini yang membentuk RMC (1) dan yang tidak membentuk RMC (0), sedangkan pada baris menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari variable dependen yang membentuk RMC (1) dan yang tidak membentuk RMC(0). Pada model yang sempurna, maka semua kasus akan berada pada diagonal dengan tingkat ketepatan peramalan 100%.